

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia global diibaratkan sebagai panggung teater atau panggung pertunjukkan yang maha besar. Sebuah panggung yang mengilustrasikan ragam tarian kehidupan dalam bingkai multikultural sebagai realitas yang tak terbantahkan, *sui generis*. Realitas ini menunjukkan bahwa dunia penuh warna. Sekaligus memberi gambaran, bahwa hampir sulit ditemukan dalam sebuah negara pun di dunia ini yang hanya terdiri dan memiliki satu kultur (*monocultur*). Dari 184 negara merdeka di dunia ini disebutkan mempunyai lebih dari 600 bahasa dan 5000 etnis. Hanya sebagian kecil saja yang menggunakan bahasa yang sama atau memiliki kesamaan etnis (Kymlicka, 1995, hlm. 1). Dalam dunia yang beragam secara etnis, budaya dan bahasa, di satu sisi kenyataan tersebut menunjukkan dunia ini sangat plural-multikultural. Sedangkan di sisi yang lain realitas tersebut juga berimplikasi terhadap potensi terjadinya konflik budaya, etnik, dan juga agama. Inilah sebuah tantangan multikulturalisme.

Potensi konflik demikian semakin terasa ketika kemajuan sains dan teknologi yang dicapai manusia telah menempatkan dunia sebagai kesatuan global yang tidak terpisahkan lagi. Desakan budaya dominan negara-negara maju telah menyebabkan semakin tersisihnya budaya lokal dalam negara-negara berkembang. Inilah era global yang telah menyebabkan setiap negara bahkan manusia tidak lagi dapat memisahkan dirinya dari pergaulan dan komunikasi global. Dalam konteks modernitas manusia bukan lagi makhluk multi dimensi, tetapi cenderung telah berubah menjadi makhluk satu dimensi (*one dimension man*). Artinya manusia terperangkap oleh kemoderenan yang sama yang ia ciptakan sendiri. Dalam *trend* masyarakat demikian, paradigma kehidupan umat manusia pun cenderung bergeser, bahkan berubah. Ikatan-ikatan primordialisme secara pelan tapi pasti akan terkena erosi paradigma dan

dinamika kehidupan yang semakin bergerak ke arah kemoderenan dan kepentingan global. Manusia semakin terjebak dalam logika positivistik yang cenderung antropo sentris.

Masyarakat moderen acapkali dipahami sebagai tipologi masyarakat yang harmonis, dinamis dan demokratis dan sering juga diyakini sebagai media untuk mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) atau masyarakat madani. Tak heran jika identitas dan atribut-atribut kemoderenan menjadi impian dan dijadikan tipe ideal bagi masyarakat dunia. Kehadiran fasilitas-fasilitas moderen di kota-kota besar di berbagai negara seperti *super mall*, dunia hiburan, fashion dan pelbagai kemudahan mengakses ke berbagai kepentingan manusia melalui bantuan sains dan teknologi sering dipahami sebagai manifestasi keterlibatan masyarakat dunia dalam arena modernisasi. Padahal di balik kemoderenan dan hiruk-pikuk dunia global ternyata tersimpan kegelisahan dan kengerian yang menghantui ummat manusia. Kompetisi teknologi canggih dan persenjataan moderen serta dampak kerusakan lingkungan yang dipertontonkan sejumlah negara maju telah menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyesalan terhadap fenomena kemoderenan. Wajar jika berbagai dampak negatif fenomena kemoderenan tersebut telah menjadi perhatian dan isu sentral dalam pikiran-pikiran Peter L. Berger (1991, hlm. 154). Menurutnya realitas masyarakat demikian diilustrasikan sebagai masyarakat industrial modern yang “terbebaskan dari wilayah agama. Agama berhenti di pintu masuk pabrik”. Sebuah realitas masyarakat yang telah kehilangan nilai-nilai luhur tradisional dan terbebaskan dari wilayah supra natural dan digantikan dengan nilai-nilai kemoderenan masyarakat borjuis-perkotaan yang penuh keserakahan. Tipologi masyarakat dalam konteks seperti ini telah mengurangi stabilitas dan mengikis struktur sosial dan struktur nilai yang sebelumnya dipertahankan.

Argumentasi serupa dikemukakan Strinati (2007, hlm. 7-8), yang menyebut masyarakat industrial sebagai “atomisasi”. Sebuah tipikal masyarakat yang kurang memiliki hubungan satu sama lain yang bermakna dan

koheren secara moral. Pola hubungan yang bersifat kontraktual, berjarak dan sporadis dan bukan bersifat komunal dan benar-benar terintegrasi. Bahkan Giddens (2003, hlm. 25) dengan tegas mengatakan “kita hidup dalam dunia yang telah rusak secara radikal, yang karenanya diperlukan obat-obat radikal juga, diperlukan terapi-terapi efektif”. Realitas inilah yang kemudian diasumsikan oleh Francis Fukuyama (2002) sebagai “The Great Disruption” atau “kekacauan besar”. Hipotesis Fukuyama demikian didasarkan kepada sejumlah persoalan krusial yang mengiringi masyarakat moderen pada sejumlah negara maju seperti terjadi di sebagian besar negara Eropa dan Jepang. Pergeseran masyarakat secara transisional dari era industri ke era informasi ditengarai telah melahirkan multi efek terhadap pelbagai hubungan kemanusiaan. Berbagai persoalan yang muncul seperti kejahatan, depopulasi dan individualisme disinyalir telah melemahkan ikatan-ikatan keluarga, lingkungan dan negara. Lebih jauh Bagi Fukuyama dalam (Supardan, 2015, hlm. 256) bahwa persoalan-persoalan krusial tersebut ditengarai sebagai indikator melemahnya *social capital* atau modal sosial karena tidak adanya rasa saling percaya antar etnik, budaya dan agama justru yang ada adalah rasa saling curiga yang dalam di antara anak bangsa yang ada.

Fenomena demikian semakin kompleks ketika masyarakat dunia kehilangan nilai-nilai universal sebagai bangsa yang multikultur. Realitas demikian seharusnya menciptakan kesatuan yang terpadu dan menumbuhkan ikatan harmoni, keselarasan, toleransi dan saling menghormati serta saling menghargai antar perbedaan. Bukan sebaliknya, interaksi budaya yang berjalan sangat cepat tersebut justru menyebabkan gesekan dan konflik kultural semakin tidak terhindarkan. Dari mulai konflik budaya internal hingga munculnya benturan-benturan antar peradaban (*The clash of civilization*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Huntington. Fenomena tersebut dapat disaksikan di sejumlah negara di dunia, seperti yang terjadi di Irlandia, Yugoslavia, Chechnya, India dan Thailand Selatan, Palestina, Suriah, Irak dan Afganistan. Dalam konteks demikian sangat perlu melahirkan pembentukan

konsep negara moderen yang berwawasan universal. Sebuah tipikal negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai universalitas kemanusiaan yang didasarkan kepada perbedaan ras, suku, budaya dan agama, baik secara politik, hukum, ekonomi, sosial maupun budaya (Parekh, 2008, hlm. 246-247).

Argumentasi Parekh di atas juga berimplikasi terhadap terjadinya perubahan pemahaman nasionalisme yang selama ini sering dipahami secara sempit. Nasionalisme atau konsep kebangsaan (*nationality*) bukan hanya sebuah konsep yang netral, melainkan mengandung berbagai konsekuensi, perspektif dan kepentingan. Karenanya nasionalisme acapkali dipahami sebagai klaim terhadap keunggulan atau superioritas suatu bangsa dan memandang atau menganggap bangsa lain lebih inferior, lebih rendah, tidak beradab, primordial dan seterusnya. Klaim seperti inilah yang kemudian melahirkan dominasi, penjajahan, penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa yang mengaku dirinya sebagai bangsa moderen yang hebat terhadap bangsa lain yang lebih rendah derajatnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap negara-negara berkembang pada masa lalu.

Belakangan pemahaman nasionalisme telah mengalami pergeseran seiring berlangsungnya globalisasi. Rupanya cukup menarik untuk dicerna wacana yang digulirkan Ritzer dan Smart (2012, hlm. 960-962) berikut ini, bahwa konsepsi nasionalisme sekarang bersifat lebih eksklusif dan partikularis. Jika di masa lalu nasionalisme merupakan ekspresi perkembangan identifikasi rakyat dengan negara, yakni menanamkan patriotisme atau *jingoistic* (cinta tanah air yang berlebihan). Sedangkan nasionalisme baru lebih bersifat *xenofobik* yaitu tidak menyukai sebagai sesuatu yang berhubungan dengan orang asing. Dengan demikian nasionalisme sekarang lebih mengedepankan ekspresi konflik di dalam negara-bangsa dan bukan konflik di antara negara-bangsa. Fokus nasionalisme baru tertuju kepada kelompok minoritas dalam negara, dan bukan kepada negara-negara lain. Dalam konteks keindonesian, kiranya masih sangat cukup relevan jika gagasan Soekarno (2005, hlm. 3-4)

tentang nasionalisme yang didasarkan kepada kesatuan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki tekad untuk bersatu menjadi satu jiwa, yakni bangsa Indonesia. Nasionalisme “bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan tubuh, bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan bangsa itu”.

Bagi Ernst Renan dalam (Supardan, 2015, hlm. 258), bahwa inti nasionalisme adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri atas komunitas manusia yang saling merasa bersetiakawan dengan satu sama lainnya. Jika hakikat bangsa adalah real karena didasarkan kepada sejarah atau dikonstruksi karena kepentingan elit politik, maka ilustrasi yang cukup menantang dikemukakan Benedict Anderson (1983), bahwa nasionalisme atau kebangsaan hanya sebagai komunitas imajiner (*imagined communities*). Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas imajiner yang mampu memberikan narasi makna bagi individu. Sebuah konstruksi untuk menggambarkan bahwa masing-masing anggota bangsa tidak pernah saling mengenal sebagian besar anggota bangsanya yang lain. Imajinasi-imajinasi itu muncul lewat deskripsi sejumlah media, baik elektronik maupun media lainnya. Billig (1995) menawarkan makna nasionalisme sebagai situasi konkrit kehidupan manusia yang digambarkan lewat pesan-pesan media. Baginya pariwisata dan olahraga dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengartikulasikan citra-citra bangsa.

Ilustrasi kebangsaan dalam perspektif Anderson di atas cukup relevan jika dihubungkan dengan konteks Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan merupakan miniatur dunia yang memiliki corak dan karakteristik bangsa multikultur yang paling unik. Keunikan corak dan karakteristik tersebut karena Indonesia memiliki keragaman secara budaya, ras, suku, bahasa dan agama paling kompleks. Variasi dan kompleksitas realitas masyarakat Indonesia yang demikian, dapat dikategorikan sebagai satu-satunya negara yang memiliki tingkat keunikan budaya paling tinggi dan paling kaya. Diferensiasi budaya yang demikian, di satu sisi dapat dipandang

sebagai potensi penting dan dapat dikembangkan menjadi satu kekuatan integrasi yang didasarkan kepada kesamaan nilai-nilai kebangsaan yang integral dan utuh (*integrating force*). Di sisi lain, fenomena tersebut, juga dapat berimplikasi menimbulkan konflik yang melahirkan benturan budaya (*culture clash*), sehingga seringkali dapat mengancam keutuhan bangsa. Serangkaian kasus-kasus konflik yang telah terjadi, seperti konflik agama di Ambon dan Poso dan konflik suku atau etnis di Aceh dan Pontianak, telah menorehkan tragedi kemanusiaan yang paling dalam sekaligus menodai integrasi bangsa (Bertrand, 2004, hlm. 47, 114 dan 161). Karena itu, perlu dilakukan upaya strategis, terencana dan berkelanjutan (*sustainability*) untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kembali benturan-benturan budaya selanjutnya.

Upaya membangun kesadaran warga masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan riil yang mesti dilakukan. Membangun kesadaran kebangsaan demikian merupakan bagian integral dalam rangka memperkuat identitas seluruh komponen masyarakat dengan mengedepankan persepsi dan paradigma yang sama. Di sinilah peran penting eksistensi negara (pemerintah) melakukan langkah-langkah strategis dan mengemas pelestarian kelangsungan keragaman tersebut dalam bingkai “piagam suci” atau “kanopi suci” dalam terminologi Berger. Sebuah piagam yang menjadi pedoman di dalam bersikap dan berperilaku bagi anak bangsa seperti mencintai tanah air, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, membangun kesadaran kebhinekatunggalikaan (multikulturalisme), mengedepankan prinsip-prinsip toleransi dan gotong-royong.

Ilustrasi menarik tentang fenomena perilaku bangsa Indonesia dewasa ini yang mengindikasikan semakin melemahnya nilai-nilai kebangsaan dapat kita saksikan bukan hanya benturan-benturan budaya sebagaimana telah dijelaskan di atas, tetapi juga telah merambah ke dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Fenomena kekerasan akhir-akhir ini terjadi terus menerus dan dimana-mana dalam skala yang makin luas. Sekelompok pelajar atau siswa dengan melakukan tawuran, kekerasan geng motor, penyalahgunaan narkoba dan lain-

lain. Revolusi teknologi yang ditandai dengan lahirnya masyarakat industrial komunikasi *cellular (hand phone)* belakangan ini telah mereduksi nilai-nilai dasar komunikasi antar teman, saudara, bahkan dalam keluarga. Ikatan-ikatan keluarga telah berubah menjadi ikatan praktis dan pragmatis serta mekanistik. Suasana demikian terjadi karena di antara mereka sudah disibukkan dan dibuai *handphone* serta *Gadget* dengan seperangkat program yang memanjakan didalamnya. Jika diamati lebih dalam, hubungan kekeluargaan yang dibangun di atas suasana harmonis, interaktif, santai dan penuh candaria, saat ini sudah menjadi barang yang langka digantikan dengan suasana yang bersifat formalistik. Fenomena lain, bahkan muncul sekelompok masyarakat dengan alasan mencari keuntungan dan demi mempertahankan diri serta melangsungkan kehidupannya (*survival*) rela untuk merugikan orang lain. Mereka tidak segan-segan mencampurkan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun ke dalam makanan dan minuman, sehingga mengancam kelangsungan kehidupan orang lain; kurangnya saling menghormati hak sesama pengguna jalan, mengakibatkan jaminan keselamatan orang lain semakin terancam. Tidak kalah menariknya adalah perilaku korupsi dan *money politic*, cenderung telah membudaya di kalangan sejumlah birokrat dan elit politik negeri ini. Hal ini semakin menambah deretan panjang yang mengindikasikan betapa sakit dan kronisnya perilaku bangsa ini. Bangsa ini, dalam perspektif penulis, seolah-olah sedang melakukan proses penghancuran diri sendiri (*self destroying nation*).

Rapuhnya nilai-nilai esensial demikian diilustrasikan dengan sangat menarik oleh Bartal (1976, hlm. 4), sebagai proses melemahnya *prosocial behaviour*. Ia menyatakan bahwa '*...helping, aiding, sharing, donating, or assisting*' disebut *prosocial behaviour*, ... *to describe behavior which was the antithesis of aggressive behavior, namely sympathy, altruism, charity and sharing*. Antitesis dari perilaku agresif seperti: simpati, altruisme, kasih sayang, dan saling berbagi.

Berkaitan dengan semakin memudarnya nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang multikultur, maka sangat perlu dilakukan upaya-upaya praktis, strategis, dinamis, sistematis dan berkelanjutan dalam mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebhinekaan bangsa. Harus diakui, bahwa lembaga yang paling representatif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut adalah lembaga pendidikan atau sekolah. Sekolah diyakini merupakan lembaga yang tidak pernah dapat tergantikan oleh lembaga atau institusi lainnya di dalam menanamkan nilai-nilai luhur tersebut. Jalur pendidikan atau sekolah sampai kapan pun diyakini masih sangat efektif dalam rangka mentransformasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Pendidikan dalam konteks ini, bukan saja berfungsi sebagai transformasi nilai-nilai fundamental, melainkan juga sebagai *agent of change* yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Termasuk melakukan transformasi nilai-nilai kebangsaan, sehingga dapat diproyeksikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Eksistensi sekolah dalam perspektif Parsons adalah suatu sistem sosial atau lembaga yang memiliki sejumlah variabel pola yang sangat efektif untuk menjembatani peralihan dari orientasi tradisional ke orientasi moderen. Variabel-variabel pola tersebut di antaranya adalah *pertama* sekolah mengedepankan orientasi kolektif dibanding orientasi diri. Nilai-nilai kolektif dan kelembagaan di sekolah jauh lebih penting dibandingkan nilai-nilai individu atau pribadi. *Kedua*, sekolah mengedepankan aspek-aspek universalisme. Artinya standar atau pedoman yang diterapkan berlaku untuk semua orang. Tidak ada perlakuan yang khusus (partikular) bagi individu atau kelompok tertentu. *Ketiga* sekolah mengutamakan prestasi atau kemampuan yang obyektif bukan berdasarkan keturunan atau status sosial (askriptif) (Johnson, 1994, hlm. 116-118; Ritzer dan Goodman, 2004, hlm. 134).

SMAN 2 Kota Cirebon merupakan institusi pendidikan yang menurut hemat penulis cukup representatif untuk dijadikan unit analisis dalam mencari format internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat multikultural.

Alasan ini diperkuat oleh realitas komunitasnya yang merepresentasikan masyarakat multikultur. Realitas pendidik dan siswanya terdiri dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Siswa di sekolah ini tercatat memiliki siswa yang relatif plural jika dibandingkan dengan sekolah sejenis yang ada di Kota Cirebon, demikian juga dengan keadaan para pendidiknya. Pluralitas demikian didasarkan pada budaya, agama, bahasa, suku dan ras. Dari hasil eksplorasi peneliti di lapangan, banyak dijumpai siswa yang berdasarkan suku dan bangsa yang berbeda seperti, suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Aceh, Minang, China dan Arab.

Indikasi di atas menunjukkan, bahwa masyarakat Kota Cirebon sangat heterogen atau multikultur. Realitas tersebut juga sekaligus merepresentasikan miniatur karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultur. Karenanya, dalam konteks masyarakat yang demikian, perlu dikembangkan sebuah model pendidikan untuk mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan yang berbasis multikultural. Paling tidak corak pendidikan yang demikian bertujuan untuk *pertama*, menjaga, mewariskan serta menumbuhkembangkan kesadaran nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme yang didasarkan kepada cinta tanah air atau patriotisme yang kuat. *Kedua*, menjaga, mewariskan serta menumbuhkembangkan kesadaran nilai-nilai persatuan dan kesatuan atau kebhinnekatunggalikaan (multikulturalisme) yang didasarkan kepada prinsip kesatuan dalam keberagaman. *Ketiga*, menjaga, mewariskan dan menumbuhkembangkan kesadaran nilai-nilai solidaritas, kesetiakawanan, dan gotong-royong antar sesama bangsa. Corak pendidikan demikian bukan hanya mengapresiasi keragaman budaya masyarakat yang multikultur, tetapi juga mentransformasikan nilai-nilai keragaman tersebut menjadi kesadaran internal dan karakteristik serta identitas bangsa.

Sejauh yang peneliti ketahui di lapangan melalui observasi dan wawancara, bahwa SMAN 2 Kota Cirebon belum sepenuhnya mengembangkan model pendidikan yang berbasis multikulturalisme. Pendekatan pendidikan yang dilakukan baru sebatas mengapresiasi keragaman

(pluralisme) atau dalam terminologi Parekh sebagai masyarakat multikultural yang akomodatif. Mengapa demikian?. Sejauh ini masih dihadapkan kepada sejumlah permasalahan seperti, masih terdapat kendala dan kesulitan untuk diproyeksikan ke dalam setiap mata pelajaran. Alasan demikian didasarkan kepada, *pertama* masih terbelenggu oleh muatan-muatan kurikulum yang bersifat cetak biru (*blue print*), sehingga implementasi dalam pembelajaran masih bersifat implisit dan kejar tayang, terutama dalam kelompok mata pelajaran IPA. *Kedua*, masih terbatasnya kemampuan para pendidik di dalam mengidentifikasi dan memahami bagaimana mengembangkan model-model pembelajaran nilai-nilai dan karakter-karakter kebangsaan dalam setiap mata pelajaran yang diampunya.

Berdasarkan realitas tersebut, maka muncul sejumlah persoalan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah, apakah model pendidikan internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang berbasis masyarakat multikultural tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip kecintaan kepada tanah air dan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan yang didasarkan kepada kebhinnekaan sebagai realitas dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang sama-sama diciptakan Tuhan? Kalau demikian, maka sangat perlu strategi untuk membingkai nilai-nilai universalitas kemanusiaan tersebut didasarkan atas persaudaraan, kesetaraan dan berkeadilan. Nilai-nilai demikian tentu perlu diaktualisasikan dalam bentuk kehidupan yang mencerminkan sikap-sikap solidaritas, empati, toleransi, kepedulian, kesalehan dan kesetiakawanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga melahirkan internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang utuh. Ataukah semangat tersebut hanya bentuk implementasi dari kewajiban untuk menyelenggarakan model pendidikan yang mengapresiasi keragaman saja, tanpa diikuti oleh tujuan pembentuk sikap yang berwawasan kebangsaan secara utuh? Jika demikian, tentu akan menimbulkan berbagai implikasi yang merugikan karena akan melahirkan siswa yang kehilangan identitas dan jati diri bangsa. Dalam konteks yang lebih parah lagi jika pada gilirannya hanya akan melahirkan generasi-generasi yang

bangga mengadopsi nilai-nilai baru yang asing (*alienation*) dan meninggalkan nilai-nilai asli (*local wisdom*) bangsanya sendiri.

Pada tataran ini, lagi-lagi dunia pendidikan menghadapi situasi yang ambivalen. Di satu sisi harus menangkal tuduhan, bahwa dunia pendidikan telah gagal melahirkan *outcome* yang kritis, kreatif, inovatif dan bermartabat. Di sisi lain pendidikan juga dipandang sebagai parameter sentral yang masih dipercaya untuk menjawab dan mencari solusi dari semua kegelisahan di atas. Institusi pendidikan masih dipercaya mampu melakukan perubahan perilaku (*agent of change*) siswanya sedikit demi sedikit secara terprogram dan berkelanjutan (*sustainability*), sehingga melahirkan generasi bangsa yang profesional, kreatif, produktif, inovatif dan bermartabat, sebagaimana banyak diklaim para pakar pendidikan. Apalagi pendidikan sering dijadikan sebagai salah satu parameter keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa (*human development index*).

Terminologi pendidikan acap kali direduksi dengan pengajaran. Padahal pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Ki Hadjar Dewantara, 1962, hlm. 20). Sedangkan pengajaran itu bersifat *transfer of knowledge* atau transfer pengetahuan yang muaranya adalah membuat anak didik cerdas secara intelektual. Hal inilah yang kurang disadari bersama. Sejatinya pendidikan itu meliputi seluruh dimensi mendasar dari kebutuhan manusia. Seringkali pemerintah dan praktisi pendidikan memandang kurikulum sebagai kerangka acuan yang *given* yang harus disampaikan apa adanya (*sui generis*) sebagai subjek material. Karena itu, tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat menumbuhkembangkan nilai-nilai kemanusiaan secara utuh dan mendasar kurang tersentuh. Guru lebih sering melakukan “kejar tayang” sebagai persyaratan formal penyampaian kurikulum secara tuntas. Jelas, bahwa pendidikan bukan semata-mata pengajaran. Pendidikan adalah *transfers of*

knowledge, value and skill. Dengan kata lain pendidikan dimaksudkan merekonstruksi dan mentransformasi ilmu pengetahuan, kecakapan serta keteladanan kepada siswanya, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupannya di masa depan dan mendapat kebahagiaan, baik lahir maupun batin.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Fenomena di atas mendeskripsikan keresahan dan kegelisahan terhadap sikap dan perilaku kebangsaan dalam masyarakat Indonesia dalam berbagai segmen kehidupan akhir-akhir ini. Menurut hemat penulis paparan sejumlah persoalan di atas dapat diidentifikasi ke dalam beberapa fenomena seperti, kurangnya kesadaran kecintaan terhadap tanah air (*patriotisme*); dan kurangnya membangun kesadaran dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan prinsip kebhinnekaan yang diaktualisasikan dalam sikap-sikap solidaritas, persaudaraan, dan gotong-royong. Dengan demikian persoalan dalam penelitian disertasi ini yang sangat mendasar adalah: ***Mengapa nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia akhir-akhir ini cenderung mengalami degradasi atau penurunan?*** Oleh karena itu diperlukan adanya upaya lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat multikultural melalui pelebagaan, sosialisasi dan internalisasi. Adapun rumusan masalah yang dikembangkan menjadi sejumlah pertanyaan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya sekolah dalam melakukan proses pelebagaan nilai-nilai kebangsaan di sekolah?.
2. Bagaimana upaya sekolah dalam melakukan proses sosialisasi nilai-nilai kebangsaan di sekolah?.
3. Bagaimana upaya sekolah dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan, baik melalui mata pelajaran maupun pembudayaan di sekolah?.

4. Bagaimana wujud pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*) dan tindakan moral (*moral action*) siswa sebagai dampak dari proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan di sekolah?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini diarahkan untuk memecahkan sejumlah permasalahan di atas dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengungkap berbagai indikator yang menjadi penyebab menurunnya nilai-nilai kebangsaan yang difokuskan untuk mengeksplorasi secara mendalam:

1. Tentang proses pelebagaan nilai-nilai kebangsaan di sekolah.
2. Tentang proses sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan di sekolah.
3. Tentang proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan baik melalui mata pelajaran, maupun pembudayaan di sekolah.
4. Tentang wujud pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*) dan tindakan moral (*moral action*) siswa sebagai dampak dari proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan di sekolah?.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini memiliki konteks pembangunan negara bangsa (*nation state*) menuju masyarakat madani (*civil society*) sangat penting. Terutama bila nilai-nilai yang mendukung terbentuknya kecintaan terhadap tanah air (*patriotisme*), membangun integrasi bangsa yang multikultur (*kebhinnekaan*) dengan lebih mengedepankan nilai-nilai solidaritas, persaudaraan dan gotong-royong diinternalisasikan melalui pendidikan. Paling tidak hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoretis maupun praktis bagi dunia pendidikan dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa, khususnya pada jenjang SMA. Berkaitan dengan dengan hal tersebut secara rinci penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara khusus dapat memberikan deskripsi obyektif tentang internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat multikultural di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Kota Cirebon, sekaligus menjadi rujukan bagi praktisi pendidikan di lingkungan sekolah dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan kepada siswa.

2. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam mengungkap dan mengembangkan khasanah keilmuan, terutama dalam menemukan model alternatif hipotetik internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan yang berbasis multikultural, khususnya dalam lingkup sekolah.
3. Memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia pendidikan sebagai lembaga yang sangat strategis dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan.
4. Sebagai bahan masukan bagi para penentu kebijakan, khususnya dalam merumuskan program-program dalam upaya membangun karakter bangsa yang bermartabat, beradab, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
5. Untuk menumbuhkembangkan motivasi keilmuan, terutama dalam bentuk penelitian di kalangan insan akademis, sehingga penelitian awal ini dapat membuka cakrawala dalam melakukan penelitian-penelitian untuk mengembangkan model internalisasi nilai-nilai kebangsaan di sekolah yang berbasis multikultural, khususnya bagi yang memiliki tifikal yang sama dengan konteks masyarakat multikultural seperti Kota Cirebon.

D. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengupas tentang meretas konsep internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat multikultural. Diskusi diawali dengan menguraikan konsep masyarakat multikultural, masyarakat multikultural dalam konteks indonesia, nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat multikultural, landasan teori nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat multikultural, relevansi

dengan hasil kajian penelitian terdahulu: sebuah diskursus singkat, dan kerangka pemikiran: struktur hubungan antara pendidikan umum, nilai-nilai kebangsaan, pendidikan multikultural dan masyarakat multikultural.

Bab III metode penelitian dengan uraian tentang pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional, lokasi, waktu dan subyek penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, uji validitas data dan terakhir teknik analisa data.

Bab IV berisi temuan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V menguraikan hasil simpulan, rekomendasi dan implikasi.

